

## KPPD Lemhanas RI: Energi dan Hunian Layak Pilar Pembangunan Nasional

Updates. - [WARTAWAN.ORG](http://WARTAWAN.ORG)

Apr 18, 2026 - 13:51



MAGELANG - Di tengah dinamika pembangunan nasional yang terus bergerak, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI kembali menunjukkan peran strategisnya. Kali ini, Akademi Militer (Akmil) di Magelang menjadi saksi bisu dilaksanakannya Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi para Ketua DPRD se-Indonesia. Sebuah momen penting yang menghadirkan dua menteri kunci: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bapak Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bapak Maruarar

Sirait. Keduanya hadir pada Sabtu (18/4/2026) untuk berbagi wawasan mendalam mengenai kebijakan strategis di sektor energi dan perumahan, dua pilar krusial yang menopang kemajuan bangsa.

“Saat ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam pemenuhan energi. Kesenjangan antara kebutuhan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai 1,6 juta barel per hari dengan produksi domestik yang hanya separuhnya, sekitar 600 ribu barel per hari, menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Ditambah lagi, ketergantungan impor energi terus mengintai stabilitas ekonomi kita,” ujar Bahlil Lahadalia, menekankan urgensi kemandirian energi sebagai prioritas utama pemerintah. Ia memaparkan tiga strategi jitu Kementerian ESDM untuk mencapai tujuan mulia ini: menggenjot produksi melalui Enhanced Oil Recovery (EOR), mempercepat eksploitasi sumur yang siap operasi, serta membuka peluang eksplorasi blok-blok migas baru.

Lebih jauh, Bahlil menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai jalan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam kita. “Melalui hilirisasi, kita tidak hanya mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah, tapi juga menciptakan geliat industri dan lapangan kerja baru di dalam negeri. Kedaulatan energi adalah bagian tak terpisahkan dari Asta Cita Bapak Presiden. Kami di Kementerian ESDM, selain mengurus energi, juga mengawal hilirisasi,” ungkapnya, menggarisbawahi komitmen presiden. Meski demikian, ia memberikan kabar baik bahwa pasokan BBM dan LPG bersubsidi dipastikan aman hingga akhir tahun 2026, memberikan rasa lega bagi masyarakat.

Sektor perumahan tak kalah pentingnya dalam agenda pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka *backlog* perumahan menjadi bukti nyata perlunya intervensi kebijakan yang komprehensif. Bapak Maruarar Sirait menyampaikan terobosan signifikan yang pertama kali dilakukan pemerintah: membuka akses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan informal. “Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami ingin memastikan tidak hanya warga berpenghasilan tetap yang bisa memiliki rumah layak. Kami membuka skema pengajuan berdasarkan bukti penghasilan, bukan sekadar slip gaji. Ini termasuk untuk mereka yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga atau tukang becak,” jelasnya.

Inovasi kebijakan ini juga mencakup pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Presiden Prabowo memberikan apresiasi yang luar biasa dengan memberikan BPHTB gratis bagi rakyat kecil. Tolong dijaga di wilayah Saudara-saudara, BPHTB sudah gratis. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pun kami gratiskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Maruarar Sirait, menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kelompok rentan.

Upaya akselerasi program pembangunan perumahan ini diperkuat dengan berbagai insentif fiskal, kemudahan perizinan, serta dukungan pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Keterlibatan sektor swasta juga menjadi kunci untuk memastikan program perumahan dapat menjangkau lebih luas dan merata.

Jelas terlihat, sektor energi dan perumahan saling terkait erat dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ketahanan energi adalah pondasi

fundamental bagi setiap aktivitas ekonomi, sementara penyediaan hunian yang layak secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sinergi kebijakan di kedua sektor ini menjadi kunci utama untuk membangun ketahanan nasional yang kokoh dan kesejahteraan yang berkesinambungan bagi seluruh rakyat Indonesia. (PERS)